

SKRIPSI

**INOVASI PEMERINTAHAN DALAM MENANGANI PERMUKIMAN
KUMUH BERBASIS *E-SURE* DI KABUPATEN JENEPONTO**



Disusun dan Diajukan Oleh

EKA PURWANTI

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11115 16

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

**INOVASI PEMERINTAHAN DALAM MENANGANI PERMUKIMAN
KUMUH BERBASIS *E-SURE* DI KABUPATEN JENEPONTO**

Skripsi

Diajukan Kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

EKA PURWANTI

Nomor Induk Mahasiswa : 105641111516

Kepada :

10/09/2021
1 exp
Smb. Alumni
R/0116/1PM/21 CD
PUR
i'

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Inovasi Pemerintahan Dalam Mengatasi Permukiman
Kumuh Berbasis E-Sure Di Kabupaten Jeneponto

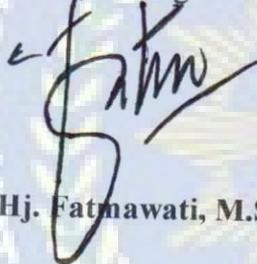
Nama Mahasiswa : Eka Purwanti

Nomor Stambuk : 10564 11115 16

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

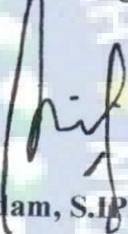
Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

Pembimbing II



Handam, S.IP, M.Si

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi

Facipol I Inismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M. Si

ABSTRAK

Eka Purwanti 2021. Inovasi Pemerintahan Dalam Menangani Permukiman Kumuh Berbasis *E-Sure* Di Kabupaten Jeneponto (dibimbing oleh Fatmawati dan Handam).

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keuntungan serta penghambat apa saja dalam inovasi dan program *E-Sure* dalam penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Jeneponto dengan memanfaatkan teknologi sebagai media utama dalam memperoleh laporan terkait jumlah kawasan kumuh di Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Informan dalam penelitian ini sebanyak empat orang terdiri dari staf dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dan masyarakat kabupaten Jeneponto. Hasil penelitian ini menunjukkan empat indikator dalam Inovasi Pemerintahan Dalam Menangani Permukiman Kumuh Berbasis *E-Sure* Di Kabupaten Jeneponto, yaitu memberikan kemudahan pelayanan, melibatkan masyarakat, menjalin kerjasama / kolaborasi, serta memanfaatkan teknologi informasi.

Kata Kunci : Inovasi, permukiman kumuh dan pemerintah daerah

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberi berbagai karunia dan nikmat yang tiada terhitung kepada seluruh makhluknya terutama manusia. Demikian pula salam dan shalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan panutan dan contoh kita di akhir zaman. Dengan keyakinan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Inovasi Pemerintahan Dalam Menangani Permukiman Kumuh Berbasis E-Sure Di Kabupaten Jeneponto.”**

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa untuk menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Handam, S.IP, M.Si selaku pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberinya bantuannya terutama kepada :

1. Kedua orang tua tercinta yang telah merawat dan mendidik sampai ketitik ini, dan tak pernah berhenti memberikan doa, nasehat, semangat dan dorongan yang luar biasa kepada penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Memotivasi dalam diri penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Demikian juga dengan Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua jurusan dan Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.Hi selaku Sekretaris jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Rudi Hardi, S.Sos., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis selama menapaki jenjang Pendidikan di bangku kuliah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Segenap Dosen serta Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan pelayanan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Pemerintah Kabupaten Jenepono yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi terkait penelitian ini. Dan juga kepada

Masyarakat Jeneponto yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi terkait penelitian ini.

7. Untuk saudariku dan suamiku atas perhatian dan juga tempat berkeluh kesah atas semua hambatan yang ada. Selalu menunjukkan betapa pentingnya ini dan selama ini sudah ingin direpotkan.



Teriring doa semoga Allah SWT menjadikan pengorbanan dan kebaikan itu sebagai cahaya penerang di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis sangat diharapkan..

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 22 April 2021

Penulis

Eka Purwanti



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	10
C. Kerangka Pikir.....	21
D. Fokus Penelitian.....	22
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	24
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	24
C. Sumber Data.....	25
D. Informan Penelitian.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	28
G. Keabsahan Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	31
B. Inovasi <i>E-Sure</i> dalam Penanganan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Jeneponto.....	36
C. Faktor Penghambat Inovasi <i>E-Sure</i> serta Keuntungan Inovasi <i>E-Sure</i> dalam Menangani Peremukimsn Kumuh di Kabupaten Jeneponto.....	36
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Kawasan Kumuh kabupaten Jeneponto.

2.1 Penelitian Terdahulu

3.1 Informan Penelitian.

4.1 Luas Kabupaten Jeneponto Berdasarkan Kecamatan.

4.2 Pertumbuhan Penduduk di kabupaten Jeneponto.

4.3 Jumlah Keluarga Miskin dan Perumahan di Kabupaten Jeneponto.

5.1 Transkrip Wawancara Informan

5.2 Transkrip Observasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permukiman adalah salah satu kebutuhan manusia yang termasuk dalam kebutuhan primer dimana hal itu harus terpenuhi supaya manusia bisa hidup layak dan sejahtera. Permukiman merupakan kebutuhan individu, tapi berubah ketika individu tersebut telah berkeluarga maka menjadi kebutuhan bersama. Selain menjadi makhluk individu manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain (Arviansyah 2017).

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman itu terdiri dari beberapa hunian dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana, serta fasilitas umum. Pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Akibatnya mempengaruhi jumlah hunian untuk masyarakat. Hal ini memunculkan masalah baru pada kawasan permukiman, yaitu makin bertambahnya kawasan permukiman yang kumuh, tidak tertata dan semraut.

Permukiman yang bisa dikategorikan sebagai kumuh adalah diantaranya kepadatan penduduk yang meningkat, air bersih masih kurang memadai, fasilitas umum yang minim, pengelolaan limbah dan pembuangan sampah juga belum tersedia dengan baik, serta ketersediaan jamban yang dianggap belum terlalu penting di masyarakat. Permukiman dengan kondisi

seperti ini yang biasanya disebut sebagai kawasan kumuh dan dikaitkan dengan kemiskinan (Hariyanto 2008).

Inovasi adalah suatu pembaharuan atau ide yang digunakan untuk mencapai target yang telah direncanakan dan memecahkan suatu masalah. Inovasi juga sebaiknya selalu dilakukan untuk meningkatkan sesuatu menjadi lebih baik dari sebelumnya, termasuk dalam pemerintahan agar bisa mengembangkan kinerja baru didalamnya. Maka dari itu pemerintahan juga selalu dituntut agar selalu mempunyai inovasi tinggi (Fontana 2009).

Inovasi dikatakan sebagai proses pengenalan program baru yang didalamnya mencakup pelayanan publik dan diharapkan mampu menghasilkan kesuksesan untuk masyarakat serta lingkungan. Pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan publik harus selalu mengeluarkan ide atau terobosan baru (Mariana 2010).

Pemerintah yang diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur segala kepentingan terkait Bangsa dan Negara. Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi adalah yang berhubungan dengan sumber ekonomi yang didalamnya berupa bentuk barang dan jasa pelayanan. Fungsi distribusi yang berkaitan dengan pendapatan masyarakat serta kekayaan masyarakat. Fungsi stabilisasi mencakup pertahanan serta keamanan, ekonomi serta moneter (Nurcholis 2005).

Dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dibutuhkan kewenangan yang secara nyata, bertanggungjawab, luas, memanfaatkan

sumber daya secara adil dan merata. Otonomi daerah adalah usaha pemberdayaan daerah untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan juga secara leluasa untuk mengelola dari sumber daya yang telah dimiliki dimana harus menyesuaikan dengan kepentingan serta potensi dan prioritas dari daerah itu sendiri. Adanya otonomi daerah membuat pemerintah dapat mengelola sumber daya secara leluasa sesuai dengan wewenangnya dan tentunya harus bisa dipertanggungjawabkan pada masyarakat secara transparan tanpa ada yang ditutupi serta efektif dan efisien artinya dilakukan secara maksimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Buzrisalti 2013).

Masyarakat memiliki peran utama dalam hal pembangunan, bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah penunjang dan memiliki tugas membantu pemerintah dalam menjalankan program yang dibuat, termasuk dalam hal pembangunan. Sedangkan pemerintahan memiliki peran sebagai pengarah, pembimbing bagi masyarakat, dan harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tercapainya tujuan pembangunan.

Masalah pemukiman kumuh juga menjadi perhatian penting bagi Kabupaten Jenepono, dimana ada beberapa wilayah yang masuk kategori kumuh dengan ditandai masih adanya sarana dan prasarana yang tidak layak dalam menjamin standar kehidupan masyarakat, seperti drainase yang buruk, ketersediaan air, masalah sampah dan bangunan yang berhimpitan sehingga terkesan kumuh.

Pemukiman kumuh merupakan wilayah atau kawasan yang mempunyai ciri fisik tidak tertata dan memiliki pola kehidupan yang jauh

dari kata bersih dengan tingkat permasalahannya perlu mendapatkan inovasi atau penanganan secara baik dan spesifik artinya meliputi fisik, ekonomi, infrastruktur serta ekonominya. Penanganan dalam kawasan permukiman kumuh ini biasanya diperlukan pendalam terlebih dahulu, karena jika tidak maka pembangunan yang diharapkan sesuai visi dan misi akan susah tercapai atau terhambat maka akan berdampak pada hail yang tidak maksimal.

Tahun 2016 sehubungan dengan SK Bupati No 299 A, mengenai penetapan kawasan permukiman kumuh di kabupaten Jeneponto, maka hasilnya adalah kawasan kumuh bisa dikatakan hampir tersebar di seluruh kecamatan yang dimasukkan dalam golongan tingkatan ringan sampai dengan tingkat berat (BPS 2016).

Tabel 1.1

Jumlah Kawasan Kumuh di Jeneponto

No.	Kecamatan	Kawasan Kumuh
1.	Kec. Bangkala	89,11 Ha
2.	Kec. Turatea	78,4 Ha
3.	Kec. Bangkala	60,1 Ha
4.	Kec. Arungkeke	53,5 Ha
5.	Kec. Bontoramba	23,12 Ha
Total		304,23 Ha

Kabupaten Jeneponto adalah kabupaten yang berada di ujung selatan bagian barat dari provinsi Sulawesi Selatan yang dimana datarannya ada dibagian tengah daerahnya, sedangkan daerah buitnya terletak dibagian utara daerah serta daerah pantainya terletak di bagian selatan daerah.

Nama Ibukota Jeneponto adalah Bontosunggu yang memiliki jarak sekitar 91 km dari kota Makassar sendiri. Secara geografis dapat dituliskan antara $5^{\circ}23'12''$ - $5^{\circ}42' 1,2''$ LS dan antara $119^{\circ}29'12''$ - $11^{\circ}5'44,9''$ BT. Kabupaten Jeneponto memiliki sebelas kecamatan yaitu kec. Bangkala, Bangkala barat, Tamalatea, Turatea, Binamu, Bontoramba, Batang, Arungkek, Taroang, Kelara, dan Rumbia. Program Penanganan permukiman kumuh harus selalu dilakukan karena sangat penting untuk diciptakannya lingkungan perumahan layak huni dilihat dari segala aspek, baik dilihat dari fisik serta sarana dan prasarananya.

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Jeneponto adalah belum tersedianya sarana informasi terkait lokasi-lokasi permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Jeneponto. Sehingga menyulitkan pemerintah melakukan penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Jeneponto. Atas dasar tersebut pemerintah Kabupaten Jeneponto melakukan teobosan baru melalui program inovasi ini yang dinamakan e-Sure (Slim Upgrading reports). Program ini merupakan rujukan dari surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati yang terdapat pada no 299 A tersebut tentang tetapan lokasi perumahan serta permukiman kumuh di kabupaten Jeneponto untuk menjadikan inovasi yang dilakukan untuk terciptanya informasi penanganan pemukiman kumuh sebagai inovasi yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sumber informasi penanganan pemukiman kumuh yang diharapkan mampu diakses serta mudah diupdate oleh individu yang peduli terhadap kawasan sekitar (JenepontoKab.go.id).

Pelaksanaan program *e-SURe* pada dasarnya menyediakan sumber informasi bagi seluruh individu yang peduli dengan lingkungan utamanya permukiman kumuh yang ada dikabupaten Jeneponto. Dan keunggulan lainnya, masyarakat bisa dengan mudahnya menyampaikan secara jelas dimana letak kawasan yang dianggap kumuh yang harus menjadi titik pembenahan oleh pemerintahan. Dengan demikian, pemerintahan mendapatkan informasi secara real dan tepat untuk menentukan langkah selanjutnya sesuai dengan prosedur pembenahan itu sendiri. Dengan adanya program inovasi ini data disampaikan didalamnya berupa data lokasi, luas yang harus ditangani, bagaimana kondisi sarana dan prasarana serta dapat mempertimbangkan berapa lama jangka waktu yang diperlukan dalam penanganan kawasan tersebut

Program inovasi *e-SURe (Slum upgrading reports)* pada akhirnya diharapkan dapat memberikan akses yang mudah untuk pemerintahan kabupaten Jeneponto untuk menyusun kebijakan untuk terselenggaranya penanganan permukiman kumuh. Selain daripada itu, adanya program *e-Sure* akan mendorong untuk tercapainya kemudahan baik untuk melaksanakan pengelolaan program serta kegiatan penanganan permukiman kumuh didaerah kota dan perdesaan yang menjadi salah satu masalah di Kabupaten Jeneponto.

Permasalahan yang kemudian muncul setelah pelaksanaan program *e-SURe* pemerintah Kabupaten Jeneponto harus menyediakan ruang yang mudah di akses oleh masyarakat dengan demikian terbangun sinergitas

antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Jeneponto

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengangkat suatu judul penelitian terkait Inovasi Pemerintahan Dalam Penanganan Pemukiman Kumuh Berbasis e-SURE di Kabupaten Jeneponto, dengan melihat sejauh mana program ini mampu untuk meminimalisir permukiman kumuh di Kabupaten Jeneponto.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yakni penanganan kawasan permukiman kumuh selama ini berjalan dengan sangat lambat dikarenakan kurangnya akses dari masyarakat ke pemerintah begitupun sebaliknya. Serta adanya faktor penghambat yang menjadikan suatu penanganan atau program dari pemerintah seperti panjangnya jangka waktu yang diperlukan karena kurang jelasnya titik kawasan yang menjadi target. Maka dari itu penulis merumuskan rumusan masalah didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keuntungan dalam inovasi dan program e-Sure dalam penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Jeneponto?
2. Faktor-faktor penghambat apa saja yang menjadi titik utama dalam penanganan permukiman kumuh berbasis e-Sure di Kabupaten Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja keuntungan dalam inovasi dan program e-Sure dalam penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Jeneponto.
2. Mengetahui faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program inovasi e-Sure dalam penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Jeneponto.

D. Manfaat Penelitian

Ditinjau dari segi manfaat memiliki, penelitian ini memiliki 2 jenis manfaat yaitu :

1. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu pemikiran serta bahan masukan untuk pelaksanaan dari penerapan inovasi program dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh bagi pemerintahan serta menjadikan pemerintahan bisa lebih meningkatkan kinerja dalam bekerja

2. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan studi perbandingan serta akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah dalam melengkapi tinjauan yang berhubungan pada pengembangan ilmu khususnya pada, Inovasi Pemerintahan Dalam Penanganan Pemukiman Kumuh .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Inovasi Permukiman Kumuh yang telah dilakukan antara lain :

No.	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
1.	(Dewi novita S, 2020) Penerapan <i>Smart Environment</i> pada Permukiman Kumuh di Bantaran Kali Code Yogyakarta	Penerapan <i>Smart Environment</i> untuk menciptakan lingkungan yang memberikan kenyamanan dan keindahan bagi yang melihatnya baik dari segi fisik dan nonfisik dikatakan berhasil walaupun belum semuanya. Ide dari memperindah tampilan permukiman dianggap ide yang bagus, meskipun jarak antar rumah sangat padat tapi dengan adanya ide pewarnaan itu maka mengundang wisatawan atau masyarakat local tertarik untuk berkunjung. Yang dahulu terlihat kumuh, kotor, dan tidak sehat. Kini menjadi daerah yang terkesan menarik.
2.	(Akhmad F Fauzi, 2015) Inovasi Pemerintah	Dari inovasi yang telah dilakukan, maka pentingnya peran pemerintahan dalam inovasi. Keterlibatan pemerintahan yang

	Kota Bandung Dalam Program Penyelesaian Permasalahan Permukiman Kumuh.	sangat mendasar adalah faktor kepemimpinan (leadership). Pemimpinan diharapkan dapat membangun kepercayaan melalui komunikasi. Yaitu dengan adanya kolaborasi, kerjasama yang kuat serta pemberdayaan masyarakat secara penuh melalui komunikasi yang intensif.
3.	(Bani perdawati h, 2014) Implementasi Revitalisasi Permukiman Kumuh di Kota Makassar (Neightboard Upgrading and Shelter Sektor Project).	Impelementasi revitalisasi pada permukiman kumuh yang dilakukan telah berjalan dengan baik, terbukti pada beberapa tempat yang terlihat segar dan bersih. Namun belum maksimal karena adanya lingkungan yang dinilai belum sehat. Salah satu kendala yang menjadikan belum maksimalnya inovasi ini adalah kurangnya kordinasi serta lahan yang digunakan untuk relokasi dan juga kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungannya.

B. Kerangka Teori

1. Inovasi

Inovasi artinya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman yang telah didapatkan kemudian dikembangkan agar dapat

membuat suatu ide untuk memperbaharui ide-ide lama dan memberikan nilai yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Selain itu inovasi mempunyai arti lain sebagai gabungan dari beberapa ide lama dengan ide yang baru untuk membuat sebuah perubahan besar kepada masyarakat, komunitas serta lingkungan (Fontana 2009, 20)

Sebuah ide inovasi tersebut biasanya dilengkapi atribut tersendiri, yaitu (Eveereh M, Rogers 1993, 14-16)

- a) Memiliki keuntungan yang relatif yaitu dalam sebuah inovasi dituntut untuk selalu mempunyai nilai lebih atau lebih unggul jika dibandingkan dengan sebelumnya.
- b) Menyesuaikan inovasi sesuai dengan inovasi yang telah diperbaharui sebelumnya. Supaya masa peralihan dan juga adaptasi antara inovasi lama menuju yang baru tidak terlalu berbeda jauh.

Salah satu cara yang dianggap memudahkan agar mengetahui berhasilnya sebuah ide yang baru dengan mengecek dan dilihat dari seberapa besar tingkat keuntungan. Inovasi juga dinilai memiliki kaitan dengan teknologi komunikasi informasi, terutama dengan internet yang memiliki peran didalam kepercayaan transparansi (Wibisono 2006: 113).

Secara umum, tujuan inovasi secara luas adalah untuk meningkatkan kualitas serta nilai sesuatu hal yang sudah ada, baik itu dari segi produk ataupun layanan. Dengan adanya inovasi terbaru diharapkan inovasi memiliki keunggulan dan manfaat yang bernilai lebih dari

sebelumnya. Memperluas jangkauan pasaran serta menggantikan produk atau juga layanan yang dianggap kurang efektif atau efisien.

2. Inovasi e-Sure

Inovasi e-Sure (slum upgrading reports) adalah sebuah inovasi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem informasi penanganan suatu permukiman kumuh yang mudah diupdate dan diakses oleh masyarakat yang peduli terhadap permasalahan permukiman dan lingkungan (Rindarjono 2012).

Berjalannya dan juga menyebarnya ide sebuah inovasi secara cepat dimasyarakat dinilai lebih kepada akses informasi serta komunikasi. Inovasi baru bisa menyebar luas apabila pemerintahan memanfaatkan sarana komunikasi dan informasi yang banyak memiliki jangkauan luas saat ini.

Masyarakat dari kalangan lebih modern cenderung dapat lebih mudah menerima adanya inovasi terbaru dibandingkan dengan kalangan yang menerapkan kehidupan tradisional. Masuknya budaya modern didalam lingkaran kalangan masyarakat membuat sebuah inovasi lebih mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakatnya. Didalam melakukan penyebaran inovasi juga bisa secara difusi yang dimana ini memiliki arti sebagai suatu proses pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan yang telah ditentukan untuk kemudian mengkomunikasikan inovasi lewat jaringan sarana komunikasi yang tersedia. Kemudian

digunakannya cara kedua yaitu diseminasi merupakan suatu proses disebarluaskannya sebuah ide yang sudah terencana dan terarah serta terkelola (Suwarno 2008).

Sementara itu inovasi dilihat dari pembaharuannya maka dijelaskan sebagai berikut (Prasetyo,2016)

- a) Pembaharuan inovasi secara inkremental yaitu cara ditingkatkannya inovasi melalui komponen-komponen saja yang sudah tersedia. Maksudnya inovasi ditekankan untuk meningkatkan bukan untuk mengubah.
- b) Pembaharuan inovasi secara radikal yaitu mengubahnya inovasi dengan keseluruhannya, segi komponen-komponennya dan sistemnya juga diubah. Namun dikatakan bahwa pembaharuan jenis ini masih jarang digunakan.
- c) Pembaharuan inovasi secara modular yaitu pembaharuan yang digunakan untuk mengubah tiap-tiap komponennya saja, selebihnya tetap sama seperti sistemnya sama.
- d) Pembaharuan inovasi secara arsitektur yaitu dilakukannya perubahan pada sistemnya serta ditingkatkannya komponen-komponen didalamnya tanpa harus mengubahnya.

Dilihat dari pendapat-pendapat ahli, bahwa dapat didapatkan inti makna dari inovasi atau ide baru yaitu hasil dari segala pemikiran-pemikiran yang telah dikembangkan lalu kemudian diaplikasikan langsung melalui

beberapa tahapan proses sampai akhirnya didapatkan dan dirasakan manfaat dari inovasi tersebut.

3. Pemerintahan

Pemerintahan atau dengan kata lain Government dalam bahasa Indonesia artinya salah satu lembaga yang berhak menjalankan pemerintahan daerah, serta memiliki wewenang pada kegiatan pemerintahan daerah dan perkotaan (Munir 2013).

Pengertian pemerintahan melihat dari segi sifat dalam artian yang meluas yaitu didalamnya terdapat kekuasaan yang bersifat legislatif, eksekutif serta yudikatif. Kemudian jika melihat dari segi artian yang sempit didalamnya hanya termasuk kekuasaan yang bersifat eksekutif saja. Perbedaan yang paling terlihat dari keduanya yaitu dalam artian secara sempit atau biasa disebut eksekutif adalah sebuah pemerintahan yang berwenang serta mengurus terlaksananya roda pemerintahan. Sedangkan dalam artian yang meluas atau biasa disebut sebagai eksekutif serta yudikatif adalah pemerintahan yang bertugas membuat aturan undang-undang dan juga melaksanakan peradilan (Syafie, 2005 : 21-22).

Dibentuknya suatu lembaga kenegaraan bertujuan untuk dijalankannya fungsi pemerintah serta kenegaraan juga. Keduanya harus bisa membuat kesatuan dalam rangka terlaksananya fungsi negara. Adanya pengakuan hakikat manusia adalah gagasan dasar yang ada pada

pemerintahan secara demokrasi. Karena manusia memiliki kemampuan sama didalam hubungan bersosial.

Dari gagasan pokok itu didapatkan dua asas pokok berdemokrasi yaitu (Melfa, 2013: 66-67) :

- a. Adanya partisipasi masyarakat didalam pemerintahan, contohnya dipihnya kepala daerah atau pemilihan wakil rakyat yang bersifat terbuka dan umum yang dinilai adil dan masih berfiat rahasia bagi lembaga perwakilan rakyat.
- b. Adanya hakikat serta martabat kemanusiaan contohnya pemerintahan dimana sebagai pelindung didalam hak asasi manusia.

Prinsip negara yang demokrasi merupakan adanya pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif serta yudikatif. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan jangkauan wilayah yang sangat luas sehingga ditetapkan asas desentralisasi dalam pemerintahan yaitu diberikannya kewenangan dari pemerintah pusat pada daerah agar dapat mengatur rumah tangganya secara mandiri, tapi tidak mencakup semua hal.

Sebuah pemerintahan yang sifatnya demokratis adalah pemerintahan yang menjalani aspirasi atau dukungan rakyat dan dianggap yang sebagai pemegang tinggi kekuasaan berada pada rakyat. Pemerintahan demokratis mempunyai ciri-ciri berikut (Wendy Melfa, 2013: 67) :

- a. Terlibatnya warga negara didalam mengambil keputusan politik secara langsung ataupun tidak langsung. Pemilu yang sifatnya jujur serta adil dan bebas namun tetap rahasia.

- b. Diakuinya serta dilindunginya terhadap hak-hak asasi manusia. Dan tidak adanya perbedaan hak bagi seluruh warga negara yang meliputi segala bidangnya.
- c. Terbentuknya penegakan hukum seperti lembaga keadilan serta kehakiman yang mandiri atau independen.
- d. Pengakuan akan adanya perbedaan keagamaan serta keragaman serta suku dan golongan didalam lingkungan masyarakat suatu negara.
- e. Digunakannya sarana media informasi atau media massa secara cepat mengenai kebijakan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah didalam melaksanakan pemerintahannya merujuk pada kepastian hukum serta tertib sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Berdasar pada kepentingan secara umum, bersifat terbuka dan sesuai proporsionalitas atau menyeimbangkan tindakan yang diambil, profesionalitas artinya tindakan harus esuai dengan kemampuan profesi, kemudian akuntabilitas artinya pertanggungjawaban atas tindakan yang diambil, bersifat efisiensi dan efektifitas artinya memilih tujuan yang tepat dari beberapa pilhan yang ada agar memberikan hasil yang besar serta bersifat keadilan atau adil.

Terselenggaranya sebuah otonomi daerah adalah dengan melihat pada sejauh mana kesejahteraan dalam masyarakat meningkat serta sejauh mana dukungan yang muncul dalam kepentingan masyarakat, ini sesuai

dengan tujuan yang ada pada undang-undang penyelenggaraan daerah (Nari 2010).

D. Permukiman Kumuh

Permukiman biasa disebut perumahan atau hunian dan tempat manusia bermukim untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Lebih dari satu permukiman yang memiliki sarana parasarana dan juga fasilitas umum. Wilayah yang kumuh artinya wilayah yang hunian masyarakatnya terbilang buruk serta sarana prasaranya belum sesuai pada standar yang ditentukan. Dari tingkat padatnya bangunan, air bersih minim tersedia, kurang sadar akan sanitasi, ruang terbukanya juga kurang. Kumuh diartikan juga sebagai suatu daerah yang kurang bersih serta bangunanya sangat tidak memenuhi syarat (Ruli 2010).

Yang artinya wilayah yang ditempati bermukim oleh daerah yang ditempati oleh penduduk masih berstatus ekonomi yang rata-rata rendah. Tidak hanya itu, dari lingkungan yang sehat diharapkan mampu sebagai sarana pembelajaran dan pembinaan mental serta keluarga masih dinilai kurang dilingkungan tersebut

Lingkungan yang telah mengalami penurunan kualitas dan secara fisiknya serta sosial ekonomi budaya sudah buruk adalah sebagian ciri dari permukiman kumuh. Kondisi seperti ini dinilai akan berbahaya untuk kehidupan bagi penduduk yang ada dalam lingkungan itu (Kurniasih 2007).

Berdasarkan pada undang-undang mengenai perumahan dan permukiman pada nomor 4 pasal 22 tahun 1992, permukiman kumuh merupakan tempat dan kawasan yang belum layak huni. Penyebab disebutnya kawasan sebagai permukiman yang kumuh adalah (Nawagamuwa, Viking dalam Haryanto 2013) :

- a) Karakter atau ciri bangunannya terlalu berumur dalam artian terlalu tua, serta tempat keluar masuknya cahaya, ventilasinya sampai pada sanitasinya masih jauh untuk memenuhi syarat sebagai rumah yang sehat.
- b) Lingkungan juga tidak memiliki open space atau ruang terbuka hijau.
- c) Jumlah penduduk yang sangat meningkat sehingga sangat terlihat padat.
- d) Sarana prasarananya belum terlaksana dengan baik.

Undang-undang No.01 tahun 2011 menyebutkan bahwa dalam masyarakat ikut turut sebagai pendukung diwujudkannya kawasan permukiman sesuai persyaratan seperti dari segi aman dan nyaman serta kepadatan bangunannya, tidak sesuai dengan tata ruang, kualitas dan sarana prasarana lingkungan dan lainnya, merupakan faktor pendukung agar cepat berjalannya sebuah inovasi yang baru.

Lokasi kawasan permukiman yang layak untuk dihuni bagi masyarakat adalah (Hermanto, 2011) :

- 1) Tidak ada masalah terkait polusi udara.

- 2) Tersedianya air yang bersih dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Kemungkinan dalam berkembangnya pembangunan cukup tinggi.
- 4) Memiliki aksesibilitas mudah dan cukup baik.
- 5) Akses menuju tempat kerja atau perkantoran dan lainnya mudah dan aman.

Permasalahan yang dinilai paling utama dalam penanganan permukiman yang kumuh adalah masih kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintahan. Karena jika hanya berjalan pada lingkaran pemerintahan saja maka tidak memiliki kesuksesan dalam jangka waktu yang panjang. Namun apabila antara masyarakat dan pemerintahan bersinergi secara baik maka akan berhasil sedikit demi sedikit akan ada terjadinya peningkatan dalam kehidupan bersama. Begitupun antar sesama pemerintahan jika komunikasi dengan baik agar dapat menangani permukiman kumuh sebagai prioritas utama (Marlina, 2006).

Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam menangani permukiman kumuh tidak berhenti sampai hanya pada perumusan dan penentuan kebijakan yang berdampak pada permukiman kumuh. Untuk melakukan kegiatan penanganan permukiman kumuh pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Jeneponto merancang *E-Sure (Slum Upgrading Reports)* yang mengacu kepada surat keputusan Bupati No. 299 A tahun 2016 yang berisi

kepada ditetapkannya kawasan lingkungan permukiman kumuh yang ada dikabupaten Jeneponto.

Sementara itu Kabupaten Gowa sudah terlebih dahulu melaksanakan penanganan pemukiman kumuh melalui peraturan daerah Gowa No.02 tahun 2018 mengenai bagaimana mencegah serta meningkatnya angka terhadap kawasan yang kumuh. Penanganan kawasan yang kumuh merupakan arahan dari peningkatan kualitas yang didasari oleh karakteristik arau ciri dan tingkatan kumuh itu sendiri. Model penanganan yang tepat digunakan berdasarkan referensi dari permasalahan adalah One Site Upgrading yang dimana ini adalah program perbaikan wilayah kampung di Kabupaten Gowa. Sementara di Kabupaten Jeneponto program *E-Sure* hanya menekankan lebih kepada pertukaran informasi yang mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat yang benar peduli terhadap lingkungan dan merujuk pada permasalahan permukiman kumuh di Kabupaten Jeneponto.

Hadirnya inovasi pemerintahan berbasis pada sarana informasi komunikasi diharapkan mampu meningkatkan inisiatif bagi masyarakat untuk selalu peduli akan hal-hal kecil bagi lingkungan. Dan diperlukan tingkatan dalam tata pemerintahan berujung kepada pemerintahan yang selalu respon pada isu-isu masalah yang tengah terjadi dalam masyarakat (Arviasnyah, 2017).

Jadi kawasan kumuh adalah tempat hunian individu dengan lingkungannya dan memiliki fungsi dalam pembinaan keluarga juga mental

serta tempat aktivitas sehari-hari. Namun harus didasarkan pada sejauh mana tempat tersebut layak huni agar tercipta suasana yang aman, nyaman, dan sehat bagi kehidupan.

C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari gambar 2.1 maka yang jadi fokus penelitiannya adalah bagaimana sebuah ide baru tersebut berjalan dan menjelaskan seperti apa keuntungan dan manfaat yang diperoleh dari inovasi tersebut dan juga manfaat dalam pemerintahan.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berikut yang menjadi deskripsi fokus pada penelitian adalah:

1. Melibatkan masyarakat dan menjalin kerjasama/kolaborasi, kehadiran inovasi ini diharapkan mampu berkurangnya keterbatasan untuk mengakses sebuah halaman informasi serta memberikan informasi. Masyarakat dan pemerintah dapat saling bertukar informasi kapan dan dimana pun tempatnya bagi yang berkepentingan.
2. Memanfaatkan Teknologi Informasi dengan mengeluarkan Inovasi *E-Sure* dalam menangani masalah permukiman Kumuh di kabupaten Jeneponto.
3. Menghemat biaya adalah kehadiran inovasi program *E-Sure* dapat meminimalisir anggaran karena informasi dapat di akses langsung oleh masyarakat ataupun masyarakat dan dapat memberikan informasi kepada pemerintah contohnya dari sisi administrasi.

4. Menghemat waktu atau dapat mengefesiensikan waktu adalah inovasi berbasis *E-Sure* dalam penanganan pemukiman kumuh dapat berjalan maksimal dan efisien karena dari data yang telah tersedia para pemangku kebijakan dapat langsung menentukan langkah-langkah untuk penanggulangan pemukiman kumuh. Serta dapat secara cepat bertukar informasi kepada instansi lainnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu serta lokasi penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 2 (dua) bulan setelah dilaksanakannya seminar proposal dan bertempat di Kabupaten Jeneponto. Adapun penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena ini bertepatan dengan dimana program e-Sure itu dijalankan. Dan tepatnya memilih kecamatan Bangkala sebagai tujuan utama untuk melakukan penelitian karena didasarkan pada jumlah data BPS yang menempatkan kecamatan Bangkala menjadi kawasan paling kumuh yang ada di Kabupaten Jeneponto.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan tentang Inovasi Pemerintahan Dalam Penanganan Pemukiman Kumuh Berbasis e-SURE di Kabupaten Jeneponto adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif, dimana jenis penelitian ini adalah dengan menjawab sebuah permasalahan namun berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan serta lebih mendalam. Sebuah teori dilaksanakan untuk sebagai pemandu atau acuan untuk fokus pada penelitian yang dilakukan (Sugiono2012:9). Yang dimaksud dalam proses penelitian ini yaitu

antara lain dilakukannya pengamatan terhadap narasumber dengan berkomunikasi atau berinteraksi dalam upaya memahami secara keseluruhan tentang pendapat apa saja mengenai pembangunan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan yaitu adalah studi kasus, dimana tipe penelitian ini adalah mendalami sebuah kasus dan gejala yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Yang dimana diharapkan mampu memahami situasi tertentu serta mendukung teori fakta yang didapatkan dan tentu juga menemukan penyebabnya.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan sebuah data yang diperoleh secara langsung dilapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Salah satunya adalah staf instansi yang berbeda terkait program pelaksanaan permukiman kumuh berbasis e-Sure di kabupaten Jeneponto.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kajian pustaka, buku, serta bacaan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dari data yang telah diperoleh maka

penulis akan mengambil sebagian data untuk kemudian dimasukkan dalam laporan penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat atau individu yang dimintai keterangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Informan yang telah dipilih adalah yang telah mengetahui bagaimana permasalahan terkait dengan penelitian tersebut. Dimana diharapkan informan mampu menyampaikan informasi serta data secara jelas dan terperinci serta obyektif dan netral dan tentunya mampu mempertanggungjawabkannya. Penulis memilih hanya 3 informan berasal dari instansi dan selebihnya adalah informan dari masyarakat yang diharapkan mampu mendukung argumen mengenai program e-Sure tersebut.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Inisial	Instansi
1.	Muh. Fuad Asiz, ST, M.Si	FA	Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Air Bersih
2.	Arifin Lukman, ST, M.Si	AL	Seksi Pemeliharaan Lingkungan Perkotaan dan Pedesaan
3.	Alwi Dg. Nompō	AN	Masyarakat di kecamatan Bangkala Jeneponto
4.	Ramlah Zakia Dg. Jinne	RZ	Masyarakat di Kecamatan Bangkala Jeneponto
Jumlah Total		4	Informan

(Sumber: Diolah oleh Penulis)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data merupakan cara yang bisa digunakan oleh peneliti agar dapat mengumpulkan data informasi yang valid dan juga jelas terkait permasalahan yang diteliti dilapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan sebuah pengamatan dilapangan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku yang menjadi target. Dalam hal ini peneliti dapat mengumpulkan data terkait informasi mengenai bagaimana program pemukiman kumuh berbasis e-Sure di kabupaten Jeneponto.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti secara langsung bertanya dalam artian berkomunikasi secara langsung sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti dan informan dapat bertukar informasi terkait permasalahan yang diteliti. Penulis menyiapkan pokok pertanyaan yang ingin ditanyakan untuk memperoleh jawaban berdasarkan fikiran dari informan untuk kemudian diambil sebagai pendukung mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi serta wawancara sekaligus juga menambahkan keakuratan, serta kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan kembali terkait keabsahan data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi. Analisis data adalah proses mengurutkan data sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan oleh penulis berdasarkan data yang diperoleh (Lexy : 103). Secara umum analisis data terdiri dari 3 yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan langkah pertama yang didalamnya termasuk dalam langkah pengelompokan, meringkas data kemudian editing. Selanjutnya kemudian peneliti menyusun catatan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat ditemukan tema ataupun mengelompokkan data.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah teknik yang biasanya memudahkan peneliti untuk melihat secara keseluruhan atau utuh laporan dan data yang diperoleh. Kemudian dilakukan penguraian data dimana

mendeskripsikan segala hal yang didapatkan untuk menarik sebuah kesimpulan dalam penelitian.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yakni membenaran atau konfirmasi terkait selama penelitian berlangsung atau selama mengumpulkan data. Dalam penarikan kesimpulan peneliti akan melakukan pengelompokan bersarkan persamaan, pola, tema, dan menelusuri data wawancara yang didapatkan untuk kemudian dibuatkan kesimpulan.

G. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dapat dilakukan untuk menguji kembali data apakah benar adanya sesuai atau tidak. Dan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi adalah metode keabsahan data untuk mengecek kembali data yang dipeoleh dari beberapa sumber dari hasil pengamatan, wawancara serta dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil wawancara serta dokumen yang ada.

2. Pengamatan Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan dalam konteks yang berbeda-beda. Artinya peneliti melakukan pengumpulan data secara berulang dengan cara yang berbeda namun dalam konteks yang sama untuk memastikan data yang diperoleh sesuai tidak dengan hanya satu sumber. Apabila

menghasilkan data yang berbeda maka akan dilakukan diskusi lebih lanjut. Peneliti melakukan pengamatan dari beberapa informan dan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Jeneponto dengan ibukota bernama Bontosunggu adalah salah satu penghasil garam di Sulawesi Selatan dengan luas wilayahnya kurang lebih 749,79 km atau 74,979 Ha yang terdiri atas 11 kecamatan dan 113 desa/kelurahan. Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan salah satunya adalah kabupaten Gowa dan Takalar di sebelah utara serta berbatasan dengan kabupaten Bantaeng di sebelah timur.

Tabel 4.1 Luas Kabupaten Jeneponto berdasarkan kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1.	Kec. Bangkala	121,82	16,25
2.	Kec. Bontoramba	152,96	20,40
3.	Kec. Rumbia	57,58	7,68
4.	Kec. Arungkeke	88,30	11,78
5.	Kec. Taroang	69,49	9,27
6.	Kec. Turatea	53,76	7,17
7.	Kec. Tamalatea	33,04	4,41
8.	Kec. Binamu	29,91	3,99
9.	Kec. Batang	40,68	5,43
10.	Kec. Bangkala barat	43,95	5,86
11.	Kec. Kelara	58,30	7,78
Total		749,79 km²	100

Sumber : Badan pusat statistik kabupaten Jeneponto

Penduduk kabupaten jenepono mengalami penambahan yang signifikan. Rata-rata pertumbuhan penduduknya tercatat 0,66 persen tiap tahunnya dan secara keseluruhan penduduk berjenis kelamin perempuan lebih besar mendominasi dibandingkan dengan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 4.2 Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Jenepono

No.	Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	2015	169.900	181.200	351.100
2.	2016	170.873	182.414	353.287
3.	2017	172.274	183.216	355.599
4.	2018	172.894	184.913	357.807
5.	2019	173.771	186.016	359.787
		Rata-Rata		355.516

termasuk juga sarana sanitasi seperti bak sampah, pengadaan kontainer sampah sampai dengan TPA atau tempat pembuangan akhir.

- d. Dinas Kesehatan dalam program perencanaan pembangunan memiliki fungsi mewadahi urusan dalam bidang kesehatan sehingga dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat dapat menjadi sarana pendukung untuk tercapainya program yang berhubungan dengan kesehatan.
- e. Kantor Lingkungan Hidup Daerah memiliki fungsi dalam penanganan permasalahan sanitasi adalah sebagai penyedia informasi yang berhubungan dengan apa dampak lingkungan yang ditimbulkan dan sebagai penyusun strategi selanjutnya dalam perencanaan program yang berdampak baik tidaknya terhadap lingkungan.
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) pasti sangat berkaitan dengan sanitasi. Dimana permasalahan sanitasi berkaitan dengan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat. Selama ini permasalahan yang ada memiliki hambatan dalam pengoperasian dan pemeliharaannya sehingga tidak lagi terbangun berlanjut akhirnya tidak menghasilkan fungsi dan kegunaan. Terkait itu Badan Pemberdayaan ini sendiri memiliki peran penting sebagai penguatan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat tidak hanya

sebagai pendukung tetapi juga bisa bekerja secara bersama-sama untuk mempermudah pembangunan.

- g. Dinas Pendidikan merupakan lembaga yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan, karena dapat menanamkan kesadaran bagi anak-anak sejak masi sekolah. Dan Sekolah merupakan tempat yang tepat untuk membentuk pola fikir individu agar sadar betapa pentingnya sanitasi dalam kehidupan.

Tabel 4.3 Jumlah Keluarga Miskin dan Perumahan di Kabupaten Jeneponto

Nama Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin (KK)	Jumlah Rumah (Unit)
Kecamatan Bangkala	5.275	11.555
Kecamatan Bangkala Barat	3.364	5.573
Kecamatan Tamalatea	3.898	9.378
Kecamatan Bontoramba	3.415	8.048
Kecamatan Binamu	3.946	10.864
Kecamatan Turatea	3.438	7.117
Kecamatan Batang	1.866	4.231
Kecamatan Arungkeke	2.007	4.184
Kecamatan Tarowang	3.104	5.393
Kecamatan Kelara	2.751	6.550
Kecamatan Rumbia	3.272	5.422
TOTAL	36.336	78.315

(Sumber: Badan Pusat statistik kabupaten Jeneponto)

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa angka kemiskinan dikabupaten Jeneponto berdasarkan pendataan penduduk adalah sebesar 36.336 KK dengan angka tertinggi berada di kecamatan Bangkala tepatnya dan terendah di kecamatan batang.

B. Inovasi e-Sure dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kabupaten Jeneponto

Inovasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dalam berkembangnya suatu organisasi atau lembaga. Baik dari sektor wisata maupun sektor publik seperti pemerintahan yang berupaya menemukan inovasi terbaru. Inovasi biasa dipahami juga sebagai proses dan praktik yang lama untuk mencapai hasil yang baru sesuai kebutuhan dan permasalahan yang ada.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berintegrasi terhadap lingkungan, pemerintah Kabupaten Jeneponto membuat sebuah inovasi yang memudahkan masyarakat dalam memberikan laporan kepada pemerintah terkait wilayah kumuh di suatu wilayah. Melalui program *e-SURE (Slum upgrading reports)* di harapkan seluruh masyarakat akan menyampaikan data terbaru mengenai perkembangan yang terjadi terkait penanganan permukiman kumuh secara lengkap dan jelas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Menghemat Biaya

Pemerintah memiliki tugas serta tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Di dalam era teknologi yang semakin hari semakin maju pemerintah juga dituntut untuk lebih kreatif dalam menciptakan program dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya program yang tidak menghabiskan banyak anggaran para pemangku kebijakan sehingga mempunyai peluang untuk melaksanakan program-program yang lain.

Biasanya dalam melakukan suatu tinjauan lokasi dan beberapa kegiatan lainnya maka diperlukan beberapa orang dan kelengkapan lainnya yang harus dibawa agar memperoleh hasil yang tepat. Jika didalam inovasi produk maka teknologi mesin akan menggantikan beberapa pekerjaan manusia, begitu juga pada inovasi layanan. Maka akan menghemat biaya dalam mengeluarkan biaya pada karyawan.

Pemerintah Kabupaten Jeneponto menyadari bahwa dalam rangka mengatasi pemukiman kumuh yang ada perlu menggunakan metode baru dan mengganti metode lama yang cenderung mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam rangka pelaksanaannya. Sehingga melalui inovasi e-SURE dapat menekan biaya penanganan pemukiman kumuh.

“Setiap instansi pemerintahan memiliki program dalam penanggulangan kawasan kumuh di Kabupaten Jeneponto sehingga menelan banyak anggaran, dengan adanya program berbasis aplikasi tentu informasi akan bersifat terpusat dan hal tersebut akan menekan penggunaan biaya dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh.” (Wawancara dengan AL 26/12/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa dengan adanya aplikasi e-SURe membuat informasi terkait data kawasan kumuh menjadi terpusat sehingga pemerintah memfokuskan penanganan berdasarkan data tersebut.

Melalui aplikasi tersebut di harapkan dapat menekan anggaran dalam penanganan kawasan kumuh. Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik merupakan sebuah bentuk inovasi yang jika di kelola dengan baik dapat meminimalisir anggaran yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan. Di era globalisasi seperti saat ini kehadiran teknologi sangat memberikan bantuan kepada pemerintah dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Program *e-SURe* merupakan salah satu hasil dari peraturan pemerintah No. 2 tahun 2016 mengenai peningkatan kualitas permukiman kumuh serta penanganan kawasan permukiman kumuh di suatu daerah. Banyaknya kegiatan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Jeneponto yang tidak tepat sasaran berpengaruh terhadap anggaran.

“Dengan adanya informasi yang terpusat tentang data kawasan kumuh di Jeneponto menjadikan pemerintah bisa menentukan kebijakan penanganan kawasan kumuh. Selama ini banyak program yang menelan banyak anggaran namun cenderung program tersebut tidak tepat sasaran sehingga hanya membuang biaya.” (Wawancara dengan AN 27/12/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa banyaknya program penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Jeneponto yang tidak tepat sasaran berdampak kepada banyaknya biaya yang harus dikeluarkan sementara hasil yang diperoleh cenderung tidak optimal. Dengan adanya inovasi *e-SURE* memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam membuat keputusan dalam penanganan kawasan kumuh.

Dari pernyataan informan tersebut, dijelaskan bahwa ada beberapa kegiatan seperti dalam dahulu dalam pelayanan administrasi masyarakat diharuskan untuk membayar jasa tergantung dari keperluannya. Setelah itu dalam hal pembangunan pemerintah biasanya menghabiskan kuang lebih sekitar delapan ratus juta untuk melaksanakan program pemerintahan, dimana hal tersebut dapat berkurang sekitar seratus juta dikarenakan pihak pemerintahan tidak lagi memerlukan segala atribut dalam kegiatan lapangannya agar memastikan tempat tersebut. Namun kegiatan lapangan mereka tergantikan dengan inovasi yang selalu dapat dipantau meskipun dalam jarak yang jauh.

Rencana Anggaran Biaya atau RAB adalah suatu proyek pembangunan yang direncanakan dengan optimal namun sebelumnya harus dilakukan banyak hal, diantaranya memastikan data atau keperluan yang ingin dipergunakan. Selain itu melihat kualitas barang atau bahan yang dipergunakan dalam membuat sebuah rancangan. Sistem informasi berbasis aplikasi terkait pelaporan kawasan kumuh memudahkan dinas pekerjaan umum Kabupaten Jeneponto dalam mengatur anggaran biaya yang akan di gunakan dalam prospek pembangunan guna mengurangi kawasan kumuh.

Dalam penanganan permukiman kumuh terlebih dahulu perlu diketahui kebutuhan kawasan dan akar masalahnya, agar dapat dirumuskan arahan yang tepat. Untuk dapat mengetahui pola penanganan yang tepat, terlebih dahulu perlu diketahui bagaimana tingkat kumuh berdasarkan beberapa kriteria penilaian, sehingga dapat diketahui kelas kawasan kumuh permukimannya. Penggunaan aplikasi dalam rangka membantu pemerintah daerah guna merumuskan kebijakan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Jeneponto akan memberikan masukan dalam membuat program sehingga instansi pemerintah terkait dapat merencanakan anggaran yang akan digunakan.

Hasil wawancara dengan informan melalui aplikasi berbasis laporan kawasan kumuh disuatu wilayah memudahkan instansi dinas lingkungan dalam merumuskan program yang mengarah terhadap

penanganan kawasan kumuh. Program tersebut tentu diselaraskan dengan kebutuhan anggaran terkait berjalannya suatu program.

Berpartisipasinya masyarakat dalam kegiatan program pembangunan menempatkan masyarakat tidak lagi sebagai sasaran dari sebuah program, namun masyarakat juga dapat terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program. Di era digitalisasi seperti sekarang ini memudahkan masyarakat untuk melakukan interaksi langsung dengan pemerintah dalam rangka proses percepatan pembangunan.

Aplikasi berbasis teknologi dalam rangka memuat laporan terkait kawasan kumuh di Kabupaten Jeneponto melibatkan masyarakat secara langsung untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat itu sendiri. Pemerintah daerah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk membentuk kelompok-kelompok dalam melakukan mapping kawasan kumuh di suatu wilayah.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait inovasi program penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Jeneponto berbasis aplikasi *e-SURe* dapat menekan biaya bagi masyarakat begitu juga dengan pemerintah. Dimana biasanya masyarakat yang memiliki tempat tinggal yang jaraknya jauh dari pusat kantor harus berfikir beberapa kali untuk pergi ke kantor pemerintah dan juga itu belum termasuk biaya administrasi dan lainnya. Adanya inovasi seperti ini

membuat masyarakat kemudian tidak perlu lagi berfikir untuk menyampaikan ataupun mencari informasi terbaru dari pemerintah.

Pemerintah juga dapat menekan biaya dari mulai keperluan transportasi kelapangan samapai dengan kebutuhan kantor untuk pengecekan kebebrapa daerah. Dengan adanya data base terkait kawasan kumuh di Kabupaten Jeneponto secara terpusat melalui aplikasi tersebut memudahkan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang nantinya akan saling berkesinambungan dengan instansi pemerintahan yang mempunyai kepentingan yang sama dan sudah pasti adanya karena penyampaian yang sesuai fakta dari masyarakat.

b. Mengefesiensikan Waktu

Penetapan waktu serta pelaksanaan sebuah program adalah kegiatan yang dilakukan suatu organisasi atau lembaga supaya pelaksanaannya dapat berjalan atau terelisasi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan diharapkan nantinya mencapai hasil yang baik juga. Sebuah inovasi dalam penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Jeneponto memerlukan waktu yang cukup panjang dalam rangka menangani kawasan kumuh di wilayah tersebut. Namun sesuai amanat kementerian PUPR terkait kawasan kumuh maka pemerintah mendorong sebuah terobosan untuk meminimalisir waktu yang digunakan dalam pelaksanaan program.

“Pemerintah dalam menjalankan kebijakan perlu standarisasi untuk pelaksanaan program sehingga berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hadirnya perangkat elektronik seperti e-SURE memberikan kemudahan dalam manajemen waktu pelaksanaan program dalam penanganan pemukiman kumuh karena sudah tersedia peta tematik kawasan dan kami tinggal menyusun target perampungan program.” (Wawancara dengan AL 26/12/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan adanya program *e-SURE* memudahkan pemerintah dalam menentukan program yang berkaitan dengan penanganan pemukiman kumuh. Dengan demikian waktu pelaksanaan program dapat di sesuaikan dengan kebutuhan prioritas dalam pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan program birokrasi pemerintah perlu menggunakan prinsip efisiensi dalam menjalankan program dengan tidak membuang-buan waktu yang di perlukan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dapat mengantisipasi banyaknya waktu yang terbuang dalam merumuskan kebijakan. Tersedianya aplikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tata ruang dengan meminimalisir tingkat kekumuhan di Kabupaten Jeneponto menjadi acuan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan sehingga waktu pelaksanaan program dapat di tentukan sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak menghambat waktu pelaksanaan.

Waktu (*timeliness*) yang tepat adalah salah satu faktor yang dalm penyajian informasi yang sesuai dengan fakta sangat memiliki peran penting didalamnya. Informasi yang didapatkan juga akan

memiliki manfaat jika tersampaikan dengan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. Dan ketepatan waktu dianggap penting dalam tingkat manfaat pembangunan karena dapat terealisasi dengan tepat sesuai target.

Ketersediaan informasi dari program *e-SURE* terkait pelaporan kawasan kumuh di Kabupaten Jeneponto memberikan kemudahan bagi dinas pekerjaan umum dalam membuat program yang bisa direalisasikan sesuai dengan ketetapan waktu yang sudah ditentukan.

“Dalam pelaksanaan program inovasi, tentu hal yang perlu diperhatikan adalah tidak masalah antara program yang satu dan yang lain. Sehingga penyusunan program perlu disusun sesuai dengan waktu pelaksanaan program. Begitu juga dengan aspirasi masyarakat. Masyarakat yang masih menerapkan pola hidup tradisional masih sangat lambat dalam mengaplikasikan inovasi seperti ini, perlu waktu yang cukup lama. Itulah mengapa masih banyaknya mayoritas masyarakat yang kurang paham akan inovasi seperti ini.” (Wawancara dengan RZ 26/12/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat ketersediaan informasi terkait kawasan pemukiman kumuh menjadi landasan aparatur terkait dalam menyusun program dan waktu pelaksanaan sehingga berjalan efektif. Biasanya waktu yang diperlukan bagi pemerintah ke instansi lain untuk berkoordinasi dalam sebuah program yang ingin disusun adalah sekitar tiga sampai empat bulan dikarenakan jarak tempuh dan juga keterlambatan untuk sampai tujuan. Belum lagi dengan masalah persetujuan dan kesibukan dari masing-masing instansi sehingga tertundanya pekerjaan. Dengan

adanya inovasi ini maka instansi yang saling terkait akan mudah dalam berkoordinasi secara online dan hanya mengirimkan via email ataupun berkas lainnya yang diperlukan. Dalam sebulan dan paling lambat dua bulan maka telah terencana segala program yang direncanakan. Semakin cepat maka akan semakin baik kondisi yang diharapkan.

Dalam masyarakat juga tidak perlu lagi jauh untuk pergi ke kantor yang bersangkutan, bisa menghemat waktu jika dilakukan pelayanan lewat online. Tidak perlu lagi untuk datang dan menunggu untuk mendapatkan pelayanan sampai berhari-hari.

Hal pertama yang dibutuhkan organisasi pemerintahan adalah mampu dalam mengatur waktu untuk menjalankan program, mampu memanfaatkan waktu luang agar segala sesuatu yang telah ditetapkan dapat berjalan secara optimal. Termasuk dalam penanganan pemukiman kumuh yang relevansi dengan pembangunan daerah. Ketetapan waktu dalam pelaksanaan kebijakan penanganan pemukiman kumuh di Kabupaten Jeneponto berorientasi dengan visi pembangunan daerah. Persoalan tersebut perlu adanya penyusunan program sehingga berjalan dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pemerintah biasanya memerlukan waktu sampai berbulan untuk saling berkoordinasi dengan instansi lain dalam menjalankan sebuah program dan kegiatan lainnya. Pentingnya manajemen waktu dalam proses pelaksanaan pelayanan memiliki dampak pada semakin

cepat juga program dan sebuah rencana pembangunan terealisasi. Hadirnya inovasi seperti ini mampu membuat masyarakat juga melaporkan secara rinci dan jelas kepada pemerintah tanpa menunggu waktu sampai berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan dalam penanganan kawasan tersebut.

Kemajuan teknologi informasi membuat masyarakat sangat berharap agar ada perbaikan pelayanan termasuk dalam pengelolaan kawasan kumuh. Banyak masyarakat yang resah akibat keterlambatan pemerintah dalam mengelola lingkungan yang berbasis kotak tanpa kumuh sehingga lambatnya pelayanan tersebut menjadikan Kabupaten Jeneponto menjadi rawan banjir di setiap musim penghujan tiba.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait inovasi *e-SURE* relevansi dengan penghematan waktu dari aparaturnya pelaksana dalam menjalankan program perbaikan kawasan pemukiman kumuh di Kabupaten Jeneponto. Keseluruhan data yang telah tersedia pada aplikasi tersebut membuat para aktor kebijakan tinggal menyusun program tanpa perlu melakukan pengkajian mendalam sehingga waktu dalam membentuk kotak tanpa kumuh jauh lebih cepat terealisasi.

c. Mengurangi Keterbatasan atau Koordinasi

Mengurangi keterbatasan ditujukan untuk dijadikan prinsip yang penting yang harus dimiliki oleh pemerintahan. Pertanggung jawaban terkait laporan yang diberikan juga adalah hasil dari kinerja yang diberikan selama masa periode yang ditentukan. Dalam konsep

good governance pemerintah dituntut lebih transparan kepada masyarakat tanpa membatasi segala informasi.

Selama ini dalam mengatasi pemukiman kumuh di Kabupaten Jeneponto pemerintah daerah bekerja sendiri dalam melakukan observasi sampai kepada tahap penyusunan agenda dalam pengelolaan kawasan kumuh yang ada tanpa keterlibatan masyarakat sedikitpun. Munculnya inovasi *e-SURE* mendorong peran serta masyarakat dalam proses pemantauan kawasan kumuh sehingga pemerintah juga lebih terbuka dalam kegiatan pengelolaannya.

“Harus kita akui melibatkan masyarakat dalam rangka pengelolaan kawasan kumuh merupakan aspek penting dalam menyongsong percepatan pembangunan di Kabupaten Jeneponto. Aplikasi *e-SURE* membuka peluang kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengurangan kawasan kumuh. Sehingga melalui aplikasi tersebut, Masyarakat dapat dengan mudah mengakses sebuah kawasan yang di anggap kumuh dan melibatkan masyarakat itu sendiri agar senantiasa memperhatikan aspek tata letak bangunan agar tidak cenderung tampak kumuh. Namun sebagian besar masyarakat masih kurang peduli akan lingkungan serta rencana program pemerintah”
(Wawancara dengan FA 26/12/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa mengurangi keterbatasan masyarakat dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan kumuh di Kabupaten Jeneponto adalah bentuk ajakan kepada masyarakat agar senantiasa berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan aspek kekumuhan di suatu wilayah.

Pemerintah memiliki tuntutan agar dapat lebih terbuka mengenai informasi . dimana proses dan informasinya serta lembaga didalamnya bisa diketahui oleh masyarakat juga sebagai individu yang dilayani. Dan informasi yang disediakan juga harus dapat dipahami dan dimengerti serta memadai. Hal ini merupakan keinginan dari masyarakat agar pelaksanaan pemerintah memiliki sifat bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme..

Kendala yang di hadapi pemerintah terkait kawasan kumuh di Kabupaten Jeneponto belum memiliki data yang terintegrasi sehingga cenderung informasi terkait kawasan kumuh berbeda antara satu instansi dengan instansi yang lainnya. Hadirnya program aplikasi *e-SURE* memudahkan *stakeholder* yang berkepentingan dalam mengakses bahkan melaporkan jika mendapati kawasan yang di anggap kumuh.

Program inovasi merupakan sebuah upaya mengurangi keterbatasan masyarakat dalam memantau kegiatan pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan prinsip transparansi yang merupakan asas keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Dilakukannya transparansi oleh pemerintah agar masyarakat bisa mengetahui dan ikut berpartisipasi dalam berjalannya program pemerintahan. Intansi pemerintah dituntut lebih terbuka dan mengurangi keterbatasan informasi kepada masyarakat dalam rangka pelayanan publik. Hal tersebut merupakan cerminan dari keseriusan

pemerintah dalam pengelolaan kawasan pemukiman kumuh karena menyangkut kesejahteraan kehidupan masyarakat.

“Program pemerintah memang lebih terbuka tanpa membatasi informasi sedikitpun kepada masyarakat. Seperti misalnya dalam rangka pembangunan infrastruktur yang kebanyakan dipegang sektor swasta disana selalu tersedia papan informasi yang memberikan informasi kepada masyarakat anggaran yang digunakan dalam kegiatan pembangunan. Apalagi sekarang hanya melalui informasi komunikasi maka akan lebih mudah masyarakat untuk melihat.” (Wawancara dengan AN 27/12/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi adalah wujud mengurangi keterbatasan karena masyarakat lebih mudah dalam mengakses seluruh informasi dan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Jeneponto.

Alasan dibentuknya sebuah inovasi karena keinginan aparatur pelayanan publik memberikan ruang kepada masyarakat agar dapat mengakses seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Pengintegrasian data kedalam sebuah bentuk aplikasi pelaporan kawasan kumuh aksi nyata pemerintah dalam membuka informasi dan mengurangi keterbatasan dalam proses pelayanan.

Mengurangi keterbatasan merupakan upaya dalam melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat ikut menentukan berhasilnya satu program kerja yang direncanakan. Tanpa adanya partisipasi masyarakat pasti tidak akan berjalan dengan baik karena keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan didalamnya. Kebutuhan

masyarakat akan standar dan kualitas pelayanan yang baik dari pemerintah mendorong terbentuknya inovasi pelaporan kawasan kumuh berbasis aplikasi. Melalui program tersebut masyarakat dapat turut serta mendorong gagasan kepada pemerintah terkait kondisi wilayah mereka.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait upaya mengurangi keterbatasan informasi melalui kehadiran aplikasi *e-SURE* merupakan sebuah target pemerintah Kabupaten Jeneponto agar masyarakat memperoleh informasi terkait penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Jeneponto. Selain itu masyarakat dapat bertukar informasi kepada pemerintah terkait kondisi wilayah mereka, agar pemerintah dapat membentuk regulasi dalam penanganan masalah yang ada di masyarakat.

d. Keputusan yang Lebih Baik

Bagi pemerintah daerah kehadiran inovasi dapat mempengaruhi sebuah keputusan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Hal tersebut sebagai wujud dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik. Proses pembangunan daerah saling berkaitan antara satu dan yang lainnya, termasuk penanganan kawasan kumuh karena apabila ditangani dengan tidak optimal dan cepat pasti akan memunculkan persoalan yang lain. Salah satu bentuk masalah yang mempengaruhi keputusan pemerintah karena tidak adanya ketersediaan data terkait kawasan kumuh sehingga dengan hadirnya aplikasi pelaporan kawasan kumuh dapat menentukan arah kebijakan pemerintah dalam proses

pembangunan. Kehadiran aplikasi berbasis informasi tentang laporan kawasan kumuh di Kabupaten Jeneponto memudahkan pemerintah dalam menentukan regulasi agar penanganan pemukiman kumuh di Kabupaten Jeneponto lebih tertata.

Tuntutan inovasi menjadikan pemerintahan daerah adalah sebagai ujung tombak didalam pelaksanaan pembangunan daerah yang selalu diharuskan memiliki ide baru yang bisa digunakan dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada. Pemerintahan adalah pihak yang berpengaruh didalam proses pembangunan. Keahlian serta tugas pemerintahan adalah faktor yang menentukan pengambilan keputusan kearah yang lebih baim dan jelas.

Dalam mengambil keputusan terkait penanganan kawasan pemukiman kumuh pemerintah Kabupaten Jeneponto memerlukan standarisasi agar keputusan yang diambil benar-benar memberikan hasil terbaik. Sehingga kehadiran aplikasi *e-SURe* lebih mempermudah pemerintah dalam bekerja secara terstruktur.

Aplikasi *e-SURe* dalam menyediakan pelaporan kawasan kumuh di Kabupaten Jeneponto tentu memberikan pengaruh kepada program yang akan dijalankan oleh pemerintahan. Perbedaan masalah serta sasaran pembangunan yang tersedia menjadi penting dalam merumuskan sebuah kebijakan.

Dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jeneponto kearah yang lebih baik di butuhkan pengambilan keputusan

berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan tidak boleh berdasarkan pedoman umum dan beberapa informasi saja karena cenderung akan menghasilkan kebijakan yang tidak optimal.

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan oleh pemerintah terkait program pembangunan berdasarkan masalah yang telah dirangkum dengan baik sehingga mampu menjawab semua permasalahan yang terjadi.

Masyarakat sebagai target dan sasaran dari program penanganan pemukiman kumuh menjadi aspek yang terpenting dalam mengevaluasi keputusan yang diambil pemerintah berkaitan dengan itu tentu pemerintah lebih berhati-hati dari program pembangunan.

“Kehadiran aplikasi yang menyediakan informasi membuat masyarakat mampu mendapat informasi terbaru dari pemerintah dan melihat apa saja kegiatan pemerintah. Masyarakat bisa turut memberikan saran kepada pemerintah terkait program pelaksanaan penanganan pemukiman kumuh” (Wawancara dengan AL 26/12/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa kehadiran aplikasi pelaporan kawasan kumuh dapat membuat masyarakat dapat berkoordinasi secara tidak langsung yang berkaitan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait pengambilan keputusan yang lebih baik dalam rangka penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Jeneponto. Melalui program aplikasi *e-SURE* ketersediaan informasi terkait kawasan kumuh di Kabupaten Jeneponto menjadi

informasi penting bagi pemerintah dalam mengambil keputusan. Salah satunya program dan cara mengatasi masalah di suatu wilayah terkait penanganan kekumuhan



BAB V

PENUTUP

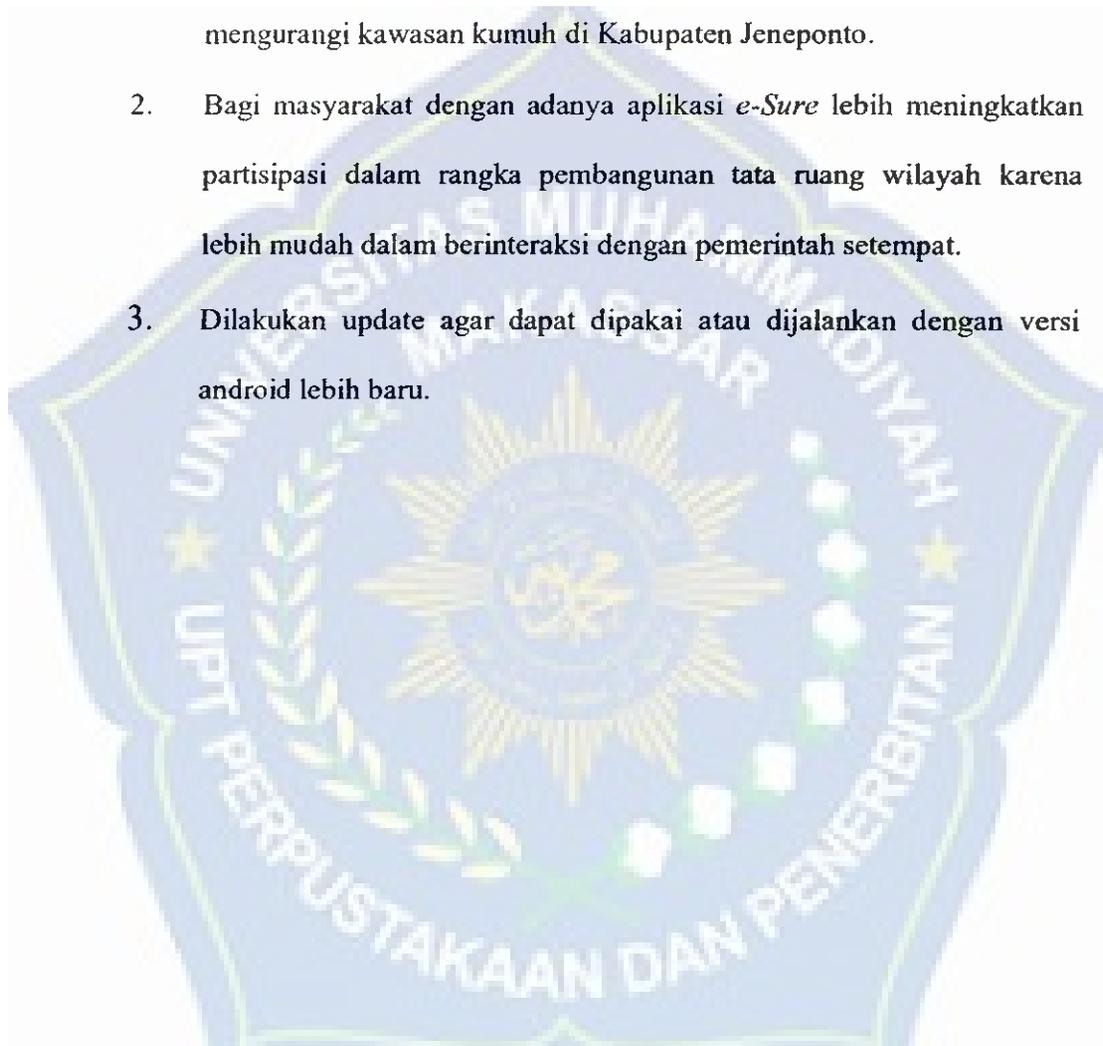
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Inovasi Pemerintahan Dalam Penanganan Pemukiman Kumuh Berbasis e-SURE di Kabupaten Jeneponto maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menghemat biaya, dengan adanya aplikasi *e-SURE* pemerintah lebih mudah mengakomodir daerah-daerah yang membutuhkan pembangunan prioritas terkait penanganan kawasan kumuh sesuai dengan aduan masyarakat yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah sehingga dapat merumuskan biaya dan pembangunan yang tepat sasaran.
2. Menghemat waktu, dengan adanya data yang telah tersedia pada aplikasi sesuai laporan masyarakat membuat para pemangku kebijakan tinggal menyusun program tanpa perlu melakukan pengkajian mendalam yang akan memakan waktu yang lama.
3. Mengurangi keterbatasan, dengan adanya aplikasi berbasis *e-Sure* memudahkan masyarakat dalam berpartisipasi untuk melaporkan kawasan kumuh di wilayah mereka dimanapun dan kapanpun, sehingga masyarakat tidak lagi mendatangi langsung dinas terkait.
4. Pengambilan keputusan, dengan adanya aplikasi *e-Sure* memudahkan pembuatan keputusan oleh pemerintah dengan target prioritas penanganan kawasan kumuh.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Jeneponto perlu melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan aplikasi *e-Sure* sehingga masyarakat benar-benar memanfaatkan program ini dalam mengurangi kawasan kumuh di Kabupaten Jeneponto.
2. Bagi masyarakat dengan adanya aplikasi *e-Sure* lebih meningkatkan partisipasi dalam rangka pembangunan tata ruang wilayah karena lebih mudah dalam berinteraksi dengan pemerintah setempat.
3. Dilakukan update agar dapat dipakai atau dijalankan dengan versi android lebih baru.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo .(2010). *Pembangunan Kota Optimum, Efisien & Mandiri*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Aditama, Tjandra Yoga. (2009). *Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis*. Jakarta : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/Menkes/Sk/V/2009
- Agussalim Andi Gadjong,(2007). *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor*.
- Arviansyah, L. (2017). *Penilaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Bantaran Sungai Cikapundung Kelurahan Tamansari*. Skripsi.
- Dede Mariana.(2010). "Otonomi Daerah dan Inovasi Kebijakan". *Governance Jurnal*. Volume 1, Nomor 1.
- Eddyono, Luthfi Widagdo, (2013). *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh MK*, Yogyakarta : Insignia Strat
- Fontana, Avanti. (2009). *Innovate We Can!*. Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Hanif Nurcholis, (2005). *Teori dan Praktek Pemerintahan Otonomi Daerah, Ctk. Pertama, PT Gramedia Widiasarana Indonesia*.
- Haryanto, Asep, (2013), *Strategi Penanganan Kawasan Kumuh sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang sehat*, Jurnal PWK Unisba
- Hermanto, Edy. (2011). *Permasalahan Lingkungan Di Permukiman Kumuh Kota (Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan)*. *Jurnal Semai Teknologi* Volume 5, Nomor 1,
- H.M. Busrizalti, (2013). *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Ctk. Pertama, Total Media, Yogyakarta.
- Kalo, J, .(2007). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global Asdi Mahasatya*, jakarta.
- Kurniasih S. (2007). *Usaha Perbaikan Permukiman Kumuh Di Pertukangan Utara Jakarta Selatan*. *Jurnal. Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur*.
- Lestari, Forina, (2006), *Identifikasi Tingkat Kerentanan Masyarakat Permukiman Kumuh Perkotaan melalui Pendekatan Sustainable Urban Livelihood (SUL) (Studi Kasus :Kelurahan Taman Sari, Bandung)*.

- Markus Nari, (2010). *Dinamika Sosial dan pemekaran Daerah Yogyakarta*.
- Marlina, E. (2006). *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Yogyakarta: Andy Yogyakarta.
- Mazria.(2012). *Pengaruh Bangunan terhadap Kerusakan Lingkungan Perkotaan*. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Nurazizah, Risyah. (2015). *Strategi Penentuan Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Ciloseh Kota Tasikmalaya Berdasarkan Kriteria Kekumuhan*. Universitas Islam Bandung.
- Pervaiz K. Ahmed and Charles D. Shepherd, (2010), *Innovation Management; context, strategies, systems & processes*, Prentice Hall
- Prasetyo, Antonius, Galih, (2016) *Innovation Discussion Paper*, Deputi Inovasi Administrasi Negara, LAN-RI
- Rindarjono, Mohammad Gamal. (2012). *Slum: Kajian Permukiman Kumuh dalam Perspektif Spasial*. Yogyakarta : Media Perkasa.
- Rizki Pratama.(2013). “ Inovasi Pelayanan Publik (Studi Deskriptif Tentang Nilai Tambah (Value Added) Inovasi Pelayanan Perizinan Bagi Masyarakat Di Kota Kediri) “. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*.Volume 1.No.4.220.
- Ruli.(2010). *Rumah Tidak Layak Huni Kota Surakarta*. Surakarta
- Sinulingga, B.D. 2005. *Pembangunan Kota Tinjauan Regional dan Lokal*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Sirojul Munir, (2013). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Ctk. Pertama*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Suryani, Tatik. (2008). *Perilaku Konsumen; Implikasi Pada Strategi Pemasaran*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Suwarno, Yogi. (2008). *Inovasi di Sektor Publik*. Journal of STIA-LAN.
- Syafiie, Inu Kencana, (2005), *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung.
- Wendi Melfa, (2013). *Pemilukada Demokrasi dan Otonomi daerah*, penerbit Beprees Bandar Lampung.
- Wibisono.(2006). *Manajemen Kinerja*. Erlangga. Jakarta